

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan sector finansial syariah berkembang begitu cepat serta begitu membantu ekonomi masyarakat. Di Indonesia terdapat berbagai sector finansial syari'ah antara lain Perbankan Syari'ah, *Insurance* Syari'ah, Investasi Syari'ah serta lainnya. Perbankan syari'ah ialah bank yang operasionalnya tunduk terhadap aturan Islam serta pada operasionalnya tidak memberikan atau membayarkan bunga terhadap nasabahnya. Bank Syari'ah ketika melaksanakan aktivitas bisnisnya berlandaskan pada dasar syari'ah, demokrasi ekonomi serta dasar kehati-hatian. Bank Islam tujuannya untuk mendukung perancangan negara pada rangka kesetaraan, kerukunan serta taraf kehidupan masyarakat sama baiknya. Perbankan Syari'ah merupakan sector finansial yang berlandaskan syariat mengadakan berbagai barang dan jasa bank dengan mekanisme keuangan yang lebih terdiversifikasi sehingga sector *banking* syari'ah jadi sistem *banking* tunggal substitusi yang handal serta bisa dituntut oleh warga negara tanpa terkecuali. Selain fungsi penghimpunan modal, bank syari'ah juga mempunyai guna perantara (*financial intermediaries*) ataupun penyedia modal sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992.(Kamila, 2022:156)

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai sector finansial syari'ah yakni perbankan syari'ah, *insurance* syari'ah, investasi syari'ah serta lainnya. Selain perbankan syari'ah, telah banyak dibangun Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah(LKMS), semacam koperasi berbasis syari'ah, Baitul Mall Wattamwil (BMT) serta Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Pada LKMS, koperasi syari'ah lebih dari sekadar instansi keuangan sosial.(Kamilah, t.t., 2022:108)

Lembaga finansial memegang andil besar pada ekonomi sebuah negara di zaman sekarang. Lembaga finansial dengan diversifikasi produknya sudah dijadikan sarana utama untuk mendorong aktivitas sosial serta ekonomi warga

yang bertumbuh dengan cepat. Pada hal tersebut, lembaga finansial dengan guna perantaraannya berperan vital untuk mendukung perkembangan *economy*. Penghasilan yang sama rata, pemberantasan kemiskinan dan *system* finansial yang stabil. Usaha untuk menyelesaikan permasalahan itu ialah dengan *system* finansial menyeluruh serta pendidikan finansial.

Seiring dengan *financial inclusion*, portal pelayanan finansial formal semacam simpanan, *credit*, alat bayar, biaya pensiunan serta sejumlah barang lain akan begitu menguntungkan kalangan berpenghasilan rendah, serta dirugikan dalam menumbuhkan kesejahteraan mereka. Sejatinya, *market* finansial ialah pusat ekonomi yang bisa berperan terhadap kelayakan perekonomian warga dengan barang serta jasa yang berguna terhadap warga. Berdasarkan *site* Bank Indonesia, *financial inclusion* dikenalkan ke warga global setelah krisis 2008 serta semakin meningkat hingga sekarang. *Financial inclusion* didasarkan pada kelompok warga kelas bawah. Jumlahnya lumayan banyak serta terpengaruh oleh krisis. Pendukung *financial inclusion* bertujuan untuk melindungi warga kelas bawah dengan memanfaatkan mereka pada kegiatan kehidupan *economy* tanpa dukungan keuangan ataupun makanan yang tersedia bagi mereka.

Hasil Survei *Financial literacy* Nasional 2016 memperlihatkan bahwasannya tingkat *financial inclusion* warga di Indonesia cuma senilai 67,82%, terutama warga perbankan, sedangkan tingkat literasi produk finansial cuma 29,66%. Indonesia masih dikuasai oleh lembaga perbankan. (Buana Retno Dewi, 2017).

Terhadap sebahagian orang, hal tersebut dianggap tidak mungkin. Memang, menciptakan kelompok kelas bawah (di bagian bawah piramida) secara umum tidak sesederhana menciptakan kelas menengah dan kelas sejahtera mereka memiliki visi yang terbatas serta sempit, tanpa memikirkan kehidupan masa depan. Dengan kondisi tersebut, mereka butuh dipupuk dikarenakan sebenarnya ada kekuatan pada dirimereka yang harus dibentuk

agar kehidupan mereka kedepannya. Mentalitas negatif semacam itu harus disingkirkan dari diri mereka supaya dapat menjadi orang yang mandiri berdasarkan kemampuannya.

Finansial terintegrasi didefinisikan sebagai usaha untuk membuat kurangnya berbagai pembatasan tarif dan non-tarif pada layanan warga terhadap penggunaan layanan finansial.(Alamsyah, 2015).

Begitu banyak warga unbankable disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan wawasan warga khususnya masyarakat menengah ke bawah, tetapi integrasi menumbuhkan kemungkinan baru agar menyediakan akses finansial dengan mobile bagi warga non-perbankan yang mau mendapatkan keuntungan dengan praktis. Akses wawasan seperti top-up kredit, bayar tagihan, transfer, serta pinjaman lunak ialah akses finansial yang diperlukan oleh warga yang kurang memiliki akses perbankan tetapi belum tersedia. Penyebab tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses ke bank adalah kesenjangan *poverty* antarprovinsi, tingginya suku bunga *credit micro*, serta minimnya keterampilan pengelolaan bisnis kecil, dan menengah. Berbagai isu itu menjadikan penerapan *financial inclusion* diIndonesia menjadi penting. (Ika, 2021.).

Lembaga finansial memiliki peran yang begitu penting untuk menggerakkan perkembangan *economy*. Lembaga finansial telah jadi mesin perkembangan lembaga nyata melalui himpunan kapital serta pembaruan *technology*. Khususnya lagi, lembaga finansial bisa mengelola simpanan. Mereka memberi debitur bermacam instrumen finansial berkualitas *high* serta berisiko kecil. Hal tersebut akan meningkatkan penanaman modal serta pada ujungnya memacu perkembangan *economy*. Industri perbankan juga memberi layanan distribusi *credit* kepada UMKM untuk mendorong perkembangan *economy*. Dengan bermacam UMKM yang gampang mendapatkan pendanaan, diharap usahanya bisa beroperasi serta bertumbuh sehingga berpengaruh terhadap perkembangan *economy*. (*Sektor Keuangan dan Pertumbuhan*

Ekonomi di Indonesia: pendekatan kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM), t.t.).

Bank ialah suatu sektor finansial yang berperan banyak pada ekonomi sebuah negara sebagai sektor perantara finansial. Bank pada pengertian Pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 mengubah UU No.7 Tahun 1992 mengenai *Banking* ialah organisasi komersial yang mengumpulkan uang dari warga berbentuk tabungan serta penyalurannya pada pelayanan publik berupa *credit* dan/atau cara lainnya untuk menaikkan taraf kehidupan orang-orang. Ditahun 2008, instansi *banking* syari'ah makin dipercayai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai bank syari'ah, dengan terdapat perlindungan aturan ini diharap bisa memicu perkembangan industri perbankan syariah..(Alfiyani & Ariningrum, 2012)

Bank syari'ah ialah sector finansial yang bekerja untuk memfasilitasi prosedur *economy* disektor nyata dengan aktivitas bisnis (penanaman modal, pembelian ataupun lain-lain) menurut dasar syari'ah, yakni kesepakatan sesuai dengan ajaran Islam antara bank dengan pihak lainnya agar menyimpan ataupun membiayai bisnis atau lainnya yang dinyatakan berdasarkan nilai Syariah dengan banyak Syariah memberi akses perbankan yang mudah semacam mendapat pendanaan agar UMKM bisa menaikkan kelayakan hidup semua orang.(Dahlan, 2014)

DiIndonesia sendiri terdapat berbagai contoh sektor finansial syari'ah yakni bank, *insurance*, investasi syari'ah, dll. Selain bank syari'ah, telah banyak berdiri Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah(LKMS), semacam koperasi berbasis syari'ah, Baitul Mall Wattamwil (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Pada LKMS, koperasii syari'ah lebih dari sekadar sektor finansial *social*. Namun, koperasi syari'ah juga merupakan organisasi komersial yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengertian sektor finansial setidaknya lebih membingungkan dari sesuatu yang tertera pada KBBI, yang menimbulkan kesan bahwasannya sector finansial

ialah lembaga disektor finansial yang tugasnya setor dana serta mendistribusikannya pada warga. (Kamilah, 2019)

Suatu visi *financial inclusion* ialah memberikan pengadaan produk serta layanan finansial berdasarkan keperluan warga, meningkatkan pemahaman warga tentang jasa finansial di sektor perbankan, meminimalisir kesadaran masyarakat akan lembaga finansial yang minim, memaksimalkan layanan warga terhadap akses finansial. Meningkatnya risiko reputasi bank terjadi dikarenakan agar memberi peningkatan akomodasi layanan finansial, berbagai negara meminimalkan standar pembuatan perbankan, yang bisa menimbulkan ketidakstabilan karena aturan yang tidak lengkap.(Asnani, 2014)

Financial Inclusion adalah rangkaian usaha yang dilaksanakan agar mengurangi berbagai jenis halangan yang dijumpai warga saat memakai layanan finansial. *Financial inclusion* memiliki tujuan agar melibatkan warga unbanked pada *financial system* sehingga mereka dapat memproses pelayanan finansial dimulai dari simpanan, *payment* serta pengiriman sampai *credit* juga *insurance*. Dengan kemudahan proses pelayanan finansial, nasabah akan lebih proaktif serta setia pada transaksi perbankan, sehingga operasional perbankan menjadi lebih lancar, yang artinya *financial system* yang stabil akan meningkat, sektor perbankan akan lebih baik. Inklusi keuangan juga termasuk rencana nasional agar memicu perkembangan *economy* dengan penghasilan yang sama rata, memberantas kemiskinan, serta kestabilan *financial system*.

Financial inclusion Index merupakan metode lain guna mengukur inklusi finansial yang memakai *index* multidimensi sesuai dengan data ekonomi makro, khususnya mengenai akses jasa di industri perbankan. Pengukuran tersebut dalam hakekatnya termasuk usaha Bank Indonesia guna menggabungkan bermacam *indicator* lembaga perbankan, sehingga ujungnya bisa digabungkan *information* tentang bermacam aspek *financial system* yang komprehensif, yakni aksesibilitas serta mutu pelayanan perbankan (Putri, 2022:98) yangmana kelemahan warga tidak mampu ialah penghasilan yang

rendah, cuma keperluan standar serta tidak ada simpanan, yang berpengaruh terhadap minimnya layanan terhadap instrumen finansial. Oleh karena itu, dari sisi layanan publik pada finansial formal, kedudukan Indonesia tetap lebih rendah dari berbagai negara ASEAN..

Tabel 1. 1 Indeks Inklusi Keuangan Negara di Asia Tenggara

Negara	Indeks Inklusi keuangan (dalam persen)	Ranking
Singapura	58,24	24
Malaysia	47,09	41
Thailand	45,59	45
Indonesia	24,85	101
Myanmar	24,36	102

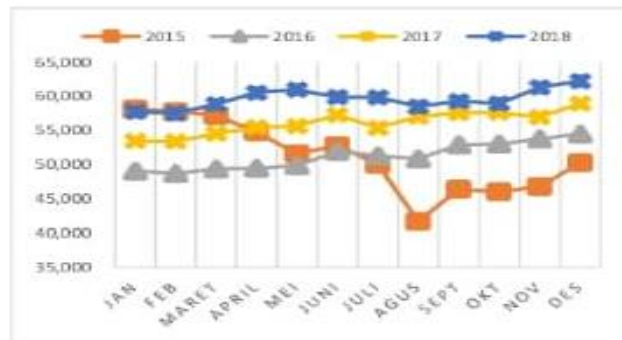
Hasil Riset 1.1 Asian Development Bank on Financial Inclusion in Creating Asia Untuk Asia Tenggara, tingkat pemahaman finansial yang paling tinggi ialah Singapura sebesar 58,24% diposisi 25/176 negara, disusul Malaysia dengan 47,09%. diposisi 41 dari 176 negara. Indonesia sendiri, tingkat pemahaman finansial masih minim dibanding negara ASEAN lain, yangmana Indonesia menempati posisi 102 dari 176 negara dengan taraf pemahaman sebesar 24,36persen. Taraf pemahaman finansial rakyat Indonesia dibanding negara ASEAN lainnya menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan serta menyeimbangkan layanan finansial bagi warga Indonesia. Oleh Bank Indonesia, alasan minimnya layanan finansial rakyat Indonesia terletak pada segi pengadaan jasa bank (supply), serta dari warga itu sendiri sebagai pemakai jasa bank (demand), terutama dikarenakan barang perbankan yang *expensive* serta tidak terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Selain itu, minimnya *information*, hambatan desain barang serta fasilitas yang cocok.(Hamzah, 2019:175)

Tetapi di sisi lainnya, taraf *financial inclusion* yang tinggi juga berdampak pada kestabilan bank. Hal ini terlihat pasca krisis finansial tahun 2008. Saat

rakyat banyak yang berpendapatan minim melaksanakan transaksi *credit* ataupun pendanaan dengan bank namun tidak berhasil mengembalikan *credit* ataupun pendanaannya, maka resiko bank semakin tinggi, yang ujungnya akan mempengaruhi kestabilan bank.

Tingkat *financial inclusion* yang tinggi akan berpengaruh pada perbankan dan warga kebanyakan yang menyimpan uangnya dibank. Hal itu artinya orang yang mempunyai akses ke jasa finansial meningkat. Hal tersebut searah dengan *bank risk*, saat *financial inclusion* meningkat maka *risk* bank juga meningkat serta disitulah kestabilan bank harus dipertahankan. Kestabilan perbankan menjadi *vital*, apalagi saat sebuah negara menghadapi keterpurukan *economy*, timbul kesusahan serta keraguan yang mengakibatkan masyarakat menelantarkan lembaga finansial formal serta lebih memilih mengelola uangnya sendiri secara informal. Selain itu, rasa takut akan kejatuhan bank saat *economy crisis* bisa mengakibatkan masyarakat mengambil uangnya dari bank. Tindakan tersebut mengakibatkan minimnya taraf *financial inclusion*, dikarenakan banyaknya masyarakat menjadi tidak aktif serta mengambil simpanannya dari bank.

Pemahaman finansial ialah serangkaian tahapan ataupun aktivitas yang memberi peningkatan pemahaman, keahlian, serta kepercayaan pengguna serta warga sehingga dapat mengatur finansialnya pribadinya secara tepat. Pemahaman finansial syariah termasuk literasi personal terhadap penanganan biaya, akad di bidang finansial syariah serta juga penanaman modal syariah dalam rangka mewujudkan kebahagiaan masa depan.



Gambar 1. 1 Literasi Keuangan 2015-2018

Sumber: OJK

Program Finansial Inklusif di Indonesia resmi dilaksanakan ditahun 2014. Program ini digagas oleh BI dengan tujuan agar memperbanyak layanan warga dalam pemakaian layanan finansial (Bank Indonesia, 2013). Padahal, penerapan finansial inklusif telah diterapkan oleh Indonesia pada bermacam bentuk semisal pemberian kredit kepada usaha rakyat (KUR) serta peningkatan lembaga keuangan mikro dalam bentuk Koperasi Perkreditan, Pengajuan dan Pemberian Pinjaman (KSP) serta BMT.

Pada Peraturan Presiden No.82 tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) ialah 75 persen guna finansial inklusif, sedangkan tujuan pemahaman finansial tertuang pada Perpres No.50 Tahun 2017 mengenai Rencana Nasional Perlindungan Pengguna 35 persen.

Dari penghujung tahun 2018 sampai awal tahun 2019, program kerja *Survey Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)* melaksanakan *survey* finansial inklusif dengan perwakilan nasional guna mengukur layanan orang-orang dengan jasa finansial formal di Indonesia terhadap inklusi keuangan dipenghujung tahun 2018. *Survey* tersebut mendapatkan bahwasannya orang dewasa lebih banyak memakai barang serta jasa yang ditawarkan oleh sector finansial formal dibandingkan dengan orang yang akunnya terdaftar atas nama pribadi. Hingga 70,3 persen orang dewasa telah memakai barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh sector finansial formal, namun cuma 55,7 persen yang mempunyai rekening (OJK 2017-2018, t.t.).

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik guna meneliti lebih jauh cara stabilitas perbankan syariah dilihat dari sudut pandang keuangan inklusif dan literasi keuangan. Serta terkait dengan skripsi tentang hal tersebut belum ada maka penulis mengambil judul : “**Pengaruh *Financial Inclusion* Dan Literasi Keuangan Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan dilatar belakang di atas, maka Peneliti melakukan identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Banyaknya masyarakat yang *unbankable* diakibatkan oleh kurangnya inisiatif dan pemahaman warga khususnya kelompok menengah ke bawah.
2. Tingkat finansial inklusif yang tinggi akan berpengaruh pada perbankan dan warga yang menyimpan uangnya dibank. Tingkat finansial inklusif yang tinggi berarti lebih banyak orang dapat menjangkau jasa finansial.

C. Batasan Masalah

Agar mengurangi pembahasan masalah yang terlalu jauh pada penelitian, adapun peneliti membuat batasan masalah untuk penelitian ini yaitu penelitian dilaksanakan ditahun 2019-2022, Objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang akan diteliti ialah:

1. Apakah *financial inclusion* berdampak pada stabilitas di Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah literasi keuangan berdampak pada stabilitas di Bank Syariah Indonesia?

3. Apakah *financial inclusion* serta literasi keuangan berdampak secara simultan pada stabilitas di Bank Syariah Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Agar memahami dampak *financial inclusion* pada stabilitas di Bank Syariah Indonesia.
2. Agar memahami dampak literasi keuangan pada stabilitas di Bank Syariah Indonesia.
3. Agar memahami pengaruh *financial inclusion* serta pemahaman finansial secara simultan pada stabilitas di Bank Syariah Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terdapat dalam hasil penelitian ini:

- a. Terhadap Penulis
Meningkatkan wawasan penulis mengenai pengaruh *financial inclusion* dan literasi finansial pada kestabilan perbankan syariah di Indonesia.
- b. Bagi Perbankan
Research ini bisa menjadi referensi dalam menolong pihak pengelola sumber daya manusia pada bank terhadap *financial inclusion* dan literasi keuangan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan stabilitas perbankan.
- c. Bagi Akademisi
Sebagai bahan pengujian *research* kedepannya, sehingga bisa menambah serta meningkatkan pengetahuan pemahaman terhadap *reader*, meningkatkan ilmu pemahaman mengenai *financial inclusion* dan literasi keuangan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.